



LAPORAN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2016**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016 telah dapat diselesaikan, sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen sesuai dengan tata nilai yang dianut yaitu "Dinkes PRIMA", Profesional, Responsif, Inovatif, Maju dan Akuntabel .

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016.

Secara teknis tujuan disusunnya LKJiP Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen adalah sebagai wujud pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), RPJMD maupun Penetapan kinerja tahunan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi serta perwujudan *Good Governance*.

Mengingat bahwa suatu pekerjaan atau tugas, seberat atau sesulit apapun dapat dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan apabila dilandasi dengan niat baik, adanya tekad dan semangat untuk maju dan selalu berbuat lebih baik dari sebelumnya, maka kepada seluruh pihak terkait disampaikan terima kasih atas partisipasi, dukungan dan bantuannya dalam penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016.

Semoga bermanfaat.

Kebumen, 25 Januari 2017



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEBUMEN
DINKES
Dr. Hj. YOHANITA RINI KRISTIANI, M.kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19621217 198902

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Data Umum Organisasi	2
C. Aspek Stratejik Organisasi	2
D. Struktur Organisasi	3
E. Sistematika Penyajian LAKIP	4
Bab II RENCANA STRATEGIK DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Visi dan Misi	5
B. Tujuan, Sasaran dan Strategi Program	6
C. Penetapan Kinerja 2012	7
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja	16
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	18
C. Analisis Akuntabilitas Keuangan	31
Bab IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	38
B. Saran	39
LAMPIRAN	
- Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2016	
- Indikator Perjanjian Kinerja	
- Perjanjian Kinerja Tahun 2016	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan tanggung jawab bersama setiap individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan swasta. Keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan oleh kontribusi dari semua sektor, berdasarkan fungsi dan peranannya masing-masing. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Setiap individu berkewajiban ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Peningkatan derajat kesehatan yang terus diupayakan oleh Pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Perwujudan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan melalui upaya kesehatan dengan pendekatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pembangunan kesehatan di kabupaten Kebumen mengacu pada Renstra Strategis Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kebumen yang telah disusun menggunakan pendekatan ; (1) politik, (2) teknokratik, (3) partisipatif, (4) pendekatan atas bawah (top-down), dan (5) pendekatan bawah atas (bottom-up). Selain itu, Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Kebumen didasarkan pada pencapaian sasaran prioritas tingkat kabupaten, Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2016 telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kebumen, sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategik (Renstra) maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016. Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2016 maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. Data Umum Organisasi

1. Dasar hukum berdirinya organisasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

2. Tugas pokok dan fungsi organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 144 tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan Pasal 3, untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan mempunyai Fungsi Sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembinaan umum dan perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan standar yang telah di tetapkan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pembinaan operasional sesuai kebijakan Bupati; dan
- d. Pelaksanaan pengembangan sumber daya kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Aspek Stratejik organisasi/peran organisasi dalam pelaksanaan

Kebijakan desentralisasi di tingkat Kabupaten mengakibatkan dampak pada pemberian kewenangan yang lebih luas bagi daerah kabupaten untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan sesuai kemampuan dan kondisi

daerah. Peran dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dalam pembangunan daerah di antaranya adalah:

1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan paradigma sehat
2. Mengupayakan perlindungan konsumen bagi produk obat, makanan dan jasa pelayanan kesehatan / medis
3. Membentuk sistem asuransi kesehatan dan jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)
4. Meningkatkan penyuluhan dan pelayanan kesehatan pada masyarakat
5. Meningkatkan mutu lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat
6. Peningkatan kepedulian Prilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam kehidupan masyarakat
7. Penanggulangan dan menekan kejadian gizi buruk pada masyarakat dalam berbagai tingkatan
8. Peningkatan pengamanan bahaya penyalahgunaan dan kesalahpahaman obat-obatan, zat adiktif dan bahan berbahaya yang lain

D. Struktur organisasi

Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten yang tidak lepas dari pembagian urusan konkuren bidang kesehatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Bidang Kesehatan merupakan urusan pemerintah konkuren yaitu urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota. Bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan bahwa Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari atas (1) Kepala Dinas, (2) Sekretariat, (3) Bidang Kesehatan Masyarakat, (4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, (5) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas, (7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan pelayanan serta sumber daya kesehatan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas dan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Kesehatan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan rencanadan program kerja di lingkungan Dinas;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian dan penyusunanperaturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainyang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

- (a) Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

(b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

(2) Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.

Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga; penyiapan penyusunan rencana kegiatan dan program di bidang pelayanan kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas :

- (a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

(b) Seksi Promosi dan pemberdayaan Masyarakat

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi promosi dan pemberdayaan masyarakat.

(c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga

(3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. bimbingan teknis dan supervise dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit terdiri atas :

(a) Seksi Surveilans dan Imunisasi

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi surveilans dan imunisasi.

(b) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

- (c) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa.

(d)

(4) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional termasuk peningkatan mutunya, sumber daya manusia, kefarmasian dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta sarana dan prasarana kesehatan.

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri atas :

- (a) Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kefarmasian dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
- (b) Seksi Sarana Prasarana Kesehatan

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi sarana dan prasarana kesehatan.

(c) Seksi Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan sumberdaya manusia kesehatan.

Adapun komposisi dukungan SDM Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

No	Jenis Tenaga	Jumlah
1.	Medis	77
2.	Perawat/Bidan	905
3.	Farmasi	51
4.	Gizi	43
5.	Sanitasi	49
6.	Epidemiologi	14
7.	Pranata Laboratorium	42
8.	Radiografer	12
9.	Elektro medik	2
10.	Perekam medis	6
11.	PKM	14
12.	Administrasi	169
13.	Analisis kesehatan	0
14.	Analisis kepegawaian	1

D. Sistematika penyajian LAKIP

Penyajian LKJiP Dinas Kesehatan tahun 2017 mengikuti pola/sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Perencanaan Kinerja

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Bab IV : Penutup

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategik 2016-2021

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2016 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2016.

1. Visi

Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen mengacu pada visi Bupati Kebumen 2016-2021 yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis Dan Berkelanjutan

2. Misi

Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen sebagai SKPD yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Kebumen maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen menitikberatkan pada pelaksanaan misi bupati sebagai berikut :

1. Melaksanakan misi ke-1 Bupati yaitu : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
2. Melaksanakan misi ke-5 Bupati yaitu: Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat;
3. Melaksanakan misi ke-6 Bupati yaitu : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayan publik, sistim kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, professional, transparan dan akuntabel yang di dukung dengan sistim pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan,

pemahaman dan pendalaman agama.

3. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan SKPD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi Misi Bupati terpilih, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen menetapkan strategi dan kebijakan penyelenggaraan pembangunan kesehatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Bersama menuju masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing, Agamis dan Berkelanjutan			
Misi 6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparat pemerintah	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	1. Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian, kehumasan, aset dan keuangan	1. Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian, kehumasan, aset dan keuangan
		2. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan	2. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan
MISI I : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya upaya pemerintah dan partisipasi penduduk dalam layanan kesehatan Meningkatnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Tertanganinya ibu hamil beresiko tinggi	1. Pengembangan Jaminan Kesehatan 2. Peningkatan kesadaran perilaku hidup sehat dan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan 3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat 4. Peningkatan upaya perbaikan gizi masyarakat 5. Peningkatan upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular 6. Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada ibu selama kehamilan dan pasca melahirkan pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar	1. Mengembangkan Jaminan Kesehatan 2. Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat dan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 4. Meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat 5. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular 6. Memperluas akses dan peningkatan pelayanan pada ibu selama kehamilan dan pasca melahirkan pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar
	Meningkatnya kesehatan anak balita	7. Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar	7. Memperluas akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar
Misi V : Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	1. Peningkatan mutu obat dan perbekalan kesehatan 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 3. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan mutu obat dan perbekalan kesehatan 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 3. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesehatan

B. Penetapan Kinerja 2016

Rencana strategik Dinas Kesehatan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan ini selanjutnya diwujudkan dalam bentuk Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan selama satu tahun anggaran. Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan yang merupakan ikhtisar rencana kerja yang akan dicapai selama satu tahun. Penetapan Kinerja ini menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran. Dalam penyusunan penetapan kinerja ini Dinas Kesehatan berpedoman pada sasaran strategis yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan.

Berikut ini sasaran dan indikator kinerja Dinas Kesehatan yang hendak dicapai pada tahun anggaran 2016 :

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Kesehatan Kebumen Tahun 2016

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2016
1.	Meningkatnya Upaya pemerintah dan partisipasi penduduk dalam layanan kesehatan	Prosentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	52 %
		Cakupan pendeteksian kasus HIV/AIDS	100 %
		Cakupan penanganan kasus DBD	100 %
		Cakupan penanganan kasus Diare	100 %
		Prosentase kasus HIV yang tertangani	100 %
		Presentase kasus KLB yang ditangani < 24 jam	100 %
		Prosentase Penemuan TB Paru BTA + pada masyarakat	55 %
		Cakupan desa melakukan STBM	65 %
		Prosentase desa siaga aktif mandiri	40 %
2.	Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat	Indek Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan	78
		Tingkat mutu pelayanan sarana kesehatan	95
		Jumlah kunjungan rawat jalan	70

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2016
		puskesmas	
3.	Capaian Penanganan Ibu dan anak beresiko tinggi sebesar 100%	Tertanganinya ibu hamil beresiko tinggi	100 %
		Angka Kematian Ibu	100/100 RB KH
		Angka Kematian Bayi	11/1000 KH
		Cakupan Pertolongan Persalinan di fasilitas kesehatan berstandart	95%
		Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	95%
		Cakupan deteksi resiko tinggi oleh tenaga kesehatan	80%
		Cakupan kunjungan nifas (KF	90%
		Cakupan penanganan komplikasi maternal	81%
		Cakupan kunjungan Neonatus Pertama (KN1)	90%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi 29 hari - 12 bulan (Kunjungan Bayi)	92 %
		Cakupan Pelayanan Anak Balita (12 - 59 bulan)	87 %
		Cakupan penanganan komplikasi neonatus	80 %
		4.	
Prosentase Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	60%		
Prosentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD	45 %		
Prosentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	45 %		
Prosentase bayi baru lahir yang mendapat inisiasi menyusui dini (IMD)	2,5 %		
Prosentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	80 %		
Prosentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	20%		

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2016
		cakupan penanganan pnemonia balita yang ditangani	100%
5.	Tidak adanya kasus gizi buruk pada balita	Meningkatnya kesehatan anak balita (terdeteksinya kasus gizi buruk)	0,04 %
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%
6.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan dasar kesehatan	100%
		Tingkat pelayanan kegawat-daruratan	100%

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Upaya pemerintah dan partisipasi penduduk dalam layanan kesehatan.	1. Prosentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan	52 %	Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Menular	
		2. Cakupan Pendeteksian kasus HIV AIDS	100 %	1. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	219.000.000,00
		3. Cakupan penanganan kasus DBD	100 %	2. Peningkatan kesehatan masyarakat akibat dampak asap rokok	419.000.000,00
		4. Cakupan penanganan kasus diare	100 %	3. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	9.310.000.000,00
		5. Prosentase kasus HIV yang tertangani	100 %	4. Revitalisasi Posyandu	262.750.000,00
		6. Prosentase kasus KLB yang ditangani < 24 jam	100 %	5. Pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular	125.000.000,00
		7. Prosentase Penemuan TB Paru BTA + pada masyarakat	55 %	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	
		8. Cakupan desa melakukan STBM	65 %	6. Pelatihan dan Pendidikan perawatan anak balita	250.000.000,00
		9. Presentase desa siaga aktif mandiri	40 %	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
		10. Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	7. Peningkatan Imunisasi	130.000.000,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		11. Cakupan pelayanan anak balita	90 %		
		12. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	100 %	Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	
		13. Cakupan peserta KB aktif	70 %		
		14. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana rujukan	100 %	8. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas	5.915.465.000,00
		15. Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100 %	9. Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	15.266.669.000,00
2.	Terwujudnya peningkatan status gizi masyarakat	16. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100 %	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
				10. Pemberian tambahan makanan dan vitamin	1.450.936.000,00
				11. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro.	80.000.000,00
		17. Cakupan institusi yang dibina	63 %	12. Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi di Institusi (UPGI)	15.000.000,00
3.	Terwujudnya lingkungan yang sehat	18. Cakupan Akses Jamban Keluarga	72,5 %	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
		19. Cakupan Akses Air Bersih	75 %	13. Pelayanan Penyehatan Lingkungan	494.025.000,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		20. Cakupan Acute Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	≥ 2 /100.000	14. Surveilans Kualitas Air	50.000.000,00
4.	Terwujudnya peningkatan kualitas pengendalian penyakit dan sistem surveillance penyakit pada penanganan KLB, Bencana dan masalah kesehatan	21. Cakupan Penemuan pnemonia balita	100 %	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
		22. Cakupan Penemuan pasien baru TB Paru BTA positif	70 %	15. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	320.000.000,00
		23. Cakupan Penderita DBD yang ditangani	100 %		
		24. Cakupan Penderita diare yang ditangani	100 %		
		25. Cakupan Penderita HIV/AIDS yang mendapatkan penanganan	100 %		
		26. Cakupan desa /kelurahan mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam	100 %		
					16. Peningkatan Surveilans Epidemiologi & Penanggulangan Wabah
5.	Terciptanya kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat	27. Cakupan desa siaga aktif	85 %	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
		28. Persentase Rumah Tangga Sehat	75 %	17. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	265.000.000,00
				18. Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dalam rangka Kebumen Sehat (Desa Siaga)	101.000.000,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		29. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100 %	19. Pemetaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Kabupaten Kebumen	60.000.000,00
6.	Terwujudnya peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, rentan, korban bencana alam, KLB dan masalah kesehatan .	30. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100 %	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	
		31. Persentase cakupan pelayanan Jamkesda	2,5 %	20. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	65.836.538.000,00
		32. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	94 %		
7.	Terpenuhinya ketersediaan dan keamanan obat, obat asli Indonesia, makanan dan perbekalan kesehatan			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	
				21. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.418.890.000,00
				Program pengawasan Obat dan Makanan	
				22. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan	284.000.000,00
				23. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	30.000.000,00
8.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber	33. Prosentase UPTD standart Akreditasi dan atau ISO	29 %	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
	daya kesehatan melalui pengembangan dan implementasi regulasi dan pengembangan profesionalisme			24. Penyusunan standar pelayanan kesehatan	188.609.000,00
		34. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	25. Evaluasi & Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	26.250.000,00
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
				26. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	153.000.000,00
				27. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	573.856.000,00
				28. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	15.000.000,00
		35. Ketersediaan Pelayanan administrasi perkantoran	100 %	29. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	246.644.000,00
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
				30. Penyediaan jasa surat menyurat	21.076.000,00
				31. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	526.211.000,00
				32. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	276.880.000,00
				33. Penyediaan jasa administrasi keuangan	82.202.000,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		
				34. Penyediaan jasa kebersihan kantor	131.740.000,00		
				35. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	386.760.000,00		
				36. Penyediaan alat tulis kantor	166.100.000,00		
						37. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	211.800.000,00
						38. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	127.600.000,00
						39. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	38.500.000,00
						40. Penyediaan makanan dan minuman	45.000.000,00
						41. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	38.500.000,00
						42. Penunjang Administrasi Perkantoran	293.400.000,00
						36. Prosentase Puskesmas Melaksanakan SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	66 %
		9.	Terlaksananya sistem informasi kesehatan terpadu dan pemanfaatan hasil penelitian bagi pengambilan keputusan	37. Tersedianya Profil Kesehatan Kabupaten kebumen	100 %	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
				38. Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Program Kesehatan	100 %	44. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	82.000.000,00
Program Pengembangan Data/Informasi							

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
				45. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	198.000.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan adalah perwujudan kewajiban Dinas Kesehatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2017 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

A. Uraian Hasil Pengukuran Kinerja

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut :

1. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
3. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Manfaat (*Benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

5. Dampak (*Impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran).

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut sebagai bagian dari Dokumen Rencana Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen untuk mencapai sasaran, antara lain :

1. Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu manajemen pelayanan kesehatan.
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen tahun 2017 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2017 disamping pencapaian SPM Bidang Kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 741 / MENKES / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2017
(Berdasarkan Perbup Kebumen No.54 Tahun 2013)

N O	INDIKATOR SPM	Realisasi Th 2016	Capaian SPM Tahun 2017			TARGET 2017
			3	4	5	
1	2		Absolut	sasaran	capaian	6
1	Cakupan Ibu Hamil K4	94,19 %	20.596	21.569	95.5 %	95 %
2	Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani	100 %	4.856	4.856	100 %	80 %
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompeten	99,70 %	15.538	19.583	99,8 %	90 %
4	Cakupan Pelayanan Nifas	98,18 %	19.383	19.583	99 %	90 %

5	Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani	100 %	2.755	2.755	100 %	80 %
6	Cakupan kunjungan Bayi	100 %	19.504	19.550	99,8 %	90 %
7	Cakupan Desa /Kelurahan UCI	100 %	460	460	100 %	100 %
8	Cakupan Pelayanan Anak Balita	96,52 %	76.076	80.805	94.4 %	90 %
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6-24 bl Gakin	85,43 %	676	690	99,7 %	100 %
10	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	100%	8 kss	8 kss	100%	100 %
11	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100 %	21.037	21.037	100 %	100 %
12	Cakupan peserta KB Aktif	73,93 %	150.396	201.350	74,6 %	70 %
13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :					
	a. AFP lebih besar atau sama dengan 2 per 100.000 penduduk dibawah umur 15 tahun	2,57 / 100 ribu	9 kss	9 kss	2,57 / 100 ribu	2 / 100 ribu
	b. Penemuan penderita pnemonia balita	100 %	4.671	4.671	100 %	100 %
	c. Penemuan pasien baru TB BTA (+)	48 %	1.503	1.762	98 %	100 %
	d. Penemuan penderita DBD yang ditangani	100%	213 KSS	213 KSS	100%	100 %
	e. Penemuan penderita Diare	100%	18.010	18.010	100%	100 %
14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar maskin	95,4 %	392.985	763.188	51,49 %	100 %
15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien maskin	3,9 %	22.105	114.478	19,3 %	100 %
16	Cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota	100 %	8	8	100 %	100 %
17	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyidikan epidemiologi kurang dari 24 jam	100 %	4	4	100 %	100 %
18	Cakupan Desa Siaga Aktif	13,9 %	460 DESA	82 DESA	17 %	18 %

Dari 18 SPM Bidang Kesehatan yang tercantum pada tabel di atas ada 4 indikator yang belum mencapai sesuai dengan target, antara lain, cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln pada keluarga miskin mencapai 99.7 % dari target 100% hal ini diberikan pada sasaran balita kurus yang ada tidak memandang dari keluarga miskin ataupun tidak, cakupan desa siaga aktif mandiri dari taerget 18 % tercapai 17 %, walaupun mengalami kenaikan dari tahun

2016 tapi belum mencapai target karena perlu adanya kerjasama dan dukungan dari lintas sektor yang sangat kuat, cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin dari target 100 % mencapai **51,49 %** , dan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dari target 100 % baru mencapai **19,3 %**, dikarenakan tidak semua masyarakat miskin mengalami sakit dan tidak semua masyarakat miskin yang sakit di rujuk di Rumah sakit strata 2 dan stata 3 karena sudah bisa di atasi di pelayanan dasar.

Disamping itu ada beberapa indikator bidang kesehatan yang tertuang dalam RPJMD , meliputi :

Tabel 3.2
Indikator kesehatan Kabupaten Kebumen

NO	INDIKATOR	REALISASI 2016	TARGET 2017	REALISASI 2017	% Capaian Kinerja 2017
1.	Usia Harapan Hidup	72,81 Tahun	72,81 Tahun	72,81 Tahun	100 %
2.	Mengurangi Tingkat Kematian Bayi (AKB)	8,95/1.000 KH	11/1000 KH	7,21 /1000 KH	134,45 %
3.	Meningkatkan Kesehatan Ibu/ Mengurangi Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	80/100.000 KH	95/100.000 KH	61,38/100.000 KH	135,39 %
4.	Tingkat Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %

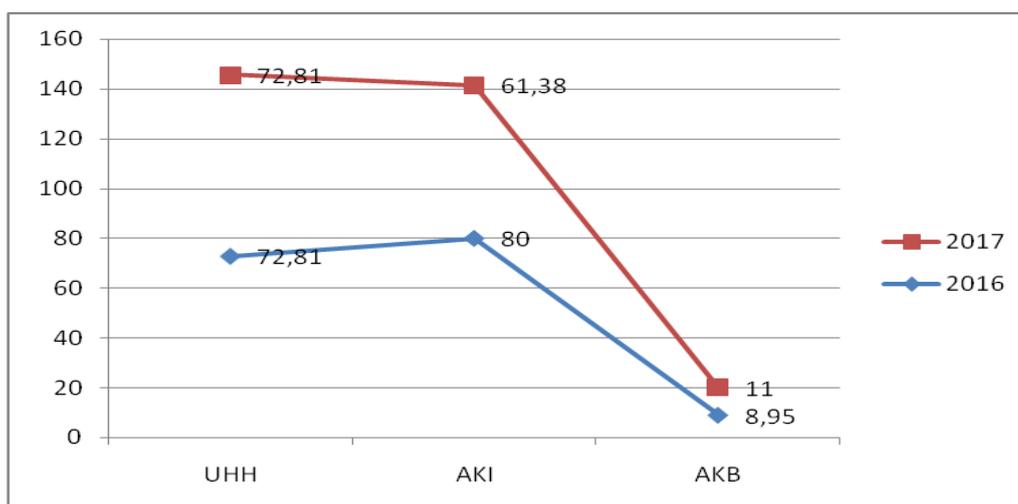
Dari 3 indikator di atas, semua sudah mencapai target RPJMD. Angka Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan angka *GIVEN* dari BPS, angka sebesar 72,81 tahun ini dikarenakan masyarakat sudah bisa mengambil keputusan bahwa pola hidup sehat merupakan tolak ukur utama untuk menghindari berbagai macam penyakit. Sedangkan pada indikator mengurangi tingkat kematian bayi (AKB) dan meningkatkan kesehatan Ibu / mengurangi angka kematian ibu (AKI) terjadi penurunan dibandingkan tahun 2016. Hal ini karena dukungan baik material maupun non material sudah baik, Program yang mendukung akselerasi AKI dan AKB sudah selaras, adanya jejaring rujukan yang maksimal dari tingkat Puskesmas ke Rumah Sakit ((peningkatan komitmen pelayanan obstetric mulai dari pelayanan tingkat

dasar sampai dengan tingkat rujukan (Rumah sakit), pemerataan penempatan Bidan Desa, Pemberdayaan Keluarga dan masyarakat dengan mengguakan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA), dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) serta sejak awal tahun 2017 semua Puskesmas sudah menjalankan Puskesmas Mampu Persalinan.

Adapun dari 12 jenis kematian Ibu di tahun 2017, sebagian meninggal dalam keadaan hamil yaitu 6 kasus karena adanya penyakit hipertensi dalam kehamilan, 2 kasus karena perdarahan, masing-masing 1 kasus dengan total 4 kasus karena penyakit penyerta yang dialami ibu selama kehamilan maupun nifas antara lain 1 kasus karena penyakit DM, 1kasus karena gagal nafas, 1 kasus karena kanker servik dan 1 kasus karena tumor paru.Sedangkan untuk angka kematian bayi sebagian besar meninggal pada saat usia 0-6 hari sebanyak 73 bayi hal ini antara lain karena BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) sebanyak 33 bayi, asfeksia sebanyak 20 bayi dan kelainan conginetal/bawaan sebanyak 20 bayi. Yang kedua saat kematian pada usia 29 hari-11 bulan sebanyak 49 bayi dan yang ketiga kematian terjadi usia 7-28 hari sebanyak 19 bayi.

Keberhasilan percepatan penurunan kematian Ibu dan Bayi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pelayanan kesehatan namun juga kemudahan masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan. Perbaikan infrastruktur yang akan menunjang akses kepada pelayanan kesehatan seperti transportasi, ketersediaan listrik, ketersediaan air bersih dan sanitasi serta pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal peran sertaterutama dalam deteksi dini resiko tinggi dan pengambilan keputusan dalam penanganan rujukan agar tidak terjadi keterlambatan.

Grafik indikator dapat dilihat dibawah ini :



Sedangkan untuk indikator tingkat akses dan tingkat mutu pelayanan kesehatan terdiri dari 3 komponen indikator antara lain : tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, tingkat pelayanan kegawatdaruratan dan tingkat mutu pelayanan sarana kesehatan. Indikator tersebut sudah mencapai 100 % (dari tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan bahwa semua puskesmas sudah

tersedia obat minimal 20 item obat indikator yang tersedia di Puskesmas, tingkat pelayanan kegawatdaruratan bahwa untuk semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Kebumen sudah mampu mengatasi pasien dengan gawat darurat, dan untuk tingkat mutu pelayanan kesehatan bahwa semua Puskesmas sudah menerapkan sistem manajemen kesehatan karena dari total 35 Puskesmas sudah dilakukan penilaian akreditasi tingkat Nasional.

**Sasaran 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
(Berdasarkan IKU OPD di Renstra Tahun 2016-2021)**

Tabel 3.3

No	Indikator	Realisasi TH 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja 2017
1	- Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	50 %	54,50%	71,8 %	131,7 %
2	- Tertanganinya balita pnemonia	100 %	100 %	100 %	100 %
3	- Tertanganinya kasus diare	100 %	100 %	100 %	100 %
4	- Tertangani kasus DBD	100 %	100 %	100 %	100 %
5	- Tertanganinya kasus HIV AIDS	100 %	100 %	100 %	100 %
6	- Universal Child Immunization (UCI) pada bayi (0 sd 11 bulan)	100 %	100 %	100 %	100 %
7	- Pendeteksian kasus AFP umur < 15 tahun	2.57/100 rb	< 2/100 rb	2.57/100 rb	128,5 %
8	- Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit dan keracunan makanan	100 %	100 %	100 %	100%
9	- Pendeteksian kasus TB Paru pada masyarakat	48 %	70 %	98 %	140%
10	- Jumlah desa pelaksana STBM	66,2%	70 %	100 %	140%
11	- Cakupan Rumah sehat	78,8 %	77 %	79,1 %	102.7%
12	- Cakupan akses jamban sehat	73,4 %	77 %	83,14 %	107,9 %
13	- Cakupan TTU yang memenuhi syarat	82,8 %	77 %	89 %	115,5%
14	- Cakupan tempat pengelolaan makanan sehat	76 %	77 %	77 %	100%
15	- Cakupan air minum yang memenuhi syarat	84,21 %	83 %	87 %	104.8%
16	- Jumlah kunjungan rawat jalan Puskesmas	81 %	75 %	97,90 %	130.5%
17	- Meningkatnya capaian posyandu strata mandiri	50 %	42 %	56 %	133.3%
18	- Meningkatnya prosentase	13,7 %	18 %	17 %	94,4%

	desa strata siaga aktif mandiri				
19	- Meningkatnya capaian PHBS strata paripurna	4 %	22 %	6 %	27,3%
20	- Cakupan penanganan ibu hamil resiko tinggi	100 %	82 %	100 %	121.9%
21	- Angka Kematian Ibu (AKI)	80,01/100	95/100 rb	61,38/100 rb	135,39 %
22	- Angka Kematian Bayi (AKB)	8,95/1000 rb	11/1000 kh	7,21/1000kh	134.45%
23	- Cakupan pertolongan persalinan di fasyankes terstandart	96.53 %	90 %	99,8 %	110.8%
24	- Cakupan kunjungan ibu hamil K4	947,19%	90 %	95,5 %	106.11%
25	- Cakupan deteksi resiko tinggi oleh nakes	94,19 %	90 %	95,5 %	106,11%
26	- Cakupan kunjungan nifas (KF)	100 %	82 %	100 %	121.95%
27	- Cakupan penanganan komplikasi maternal	98,18 %	90 %	99 %	110%
28	- Cakupan kunjungan neonatus (KN1)	100 %	81 %	100 %	123.4%
29	- Cakupan kunjungan bayi	100 %	92 %	99 %	107.6%
30	- Cakupan pelayanan anak balita	96,52 %	93 %	99,8 %	107.3%
31	- Cakupan pelayanan komplikasi neonatus	100 %	80 %	94,4 %	118%
32	- Cakupan penjangkaran anak sekolah siswa baru SD/MI sederajat	100 %	81 %	100 %	123,4%
33	- Prosentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	100 %	100 %	100 %	100%
34	- Prosentase ibu hamil yang mendapat FE	100 %	100 %	100 %	100%
35	- Prosentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	41,8 %	50 %	50,72 %	101.4%
36	- Prosentase balita kurus yang mendapat makan tambahan	85,43 %	90 %	99,7 %	110,7%
37	- Prosentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	0 %	50 %	80,5 %	161%

Dari 37 indikator pada tabel di atas mengalami kenaikan realisasi dari tahun 2016 ke tahun 2017 dan sebagian indikator sudah mencapai target bahkan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan banyaknya program dan kegiatan yang sudah mendukung indikator tersebut, adanya kerjasama yang baik mulai dari tingkat desa sampai kabupaten serta dukungan dana baik dari Kabupaten, Propinsi maupun Pusat. Disamping itu dengan adanya kenaikan peserta BPJS juga menambah kenaikan pada kunjungan di Puskesmas atau

UPTD pelayanan Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama, namun ada juga beberapa indikator yang belum mencapai sesuai target yaitu capaian Desa Siaga Aktif Mandiri serta capaian PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) strata Paripurna hal ini salahnya satunya dikarenakan masih kurangnya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Desa untuk pengembangan Desa Siaga Aktif Mandiri maupun (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) PHBS strata Paripurna, harapan di tahun 2018 dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2017 tentang pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan meningkatnya dukungan dari Pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana Desa maka capaian indikator tersebut bisa meningkat.

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan

Tabel 3.4

No	Indikator	Realisasi TH 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja 2017
1	- Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan dasar kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %
2	- Banyaknya fasilitasasi	2	2	2	100 %
3	- Banyaknya fasilitasasi pengawasan obat dan makanan	100 %	100 %	100 %	100 %
4	- Tingkat pelayanan kegawatdaruratan - Indek survay kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	76 %	80 %	76,09 %	95,11 %

Dari 5 indikator pada tabel di atas hanya terdapat 1 indikator yang belum mencapai target yaitu indek survay kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan walaupun mengalami kenaikan 0,9 %. Hal ini karena penilaian pada tahun 2016 menggunakan Permenpan Nomor 25 Tahun 2004 sedangkan untuk penilaian di tahun 2017 dengan menggunakan Permenpan Nomor 16 Tahun 2014, dimana dalam Permenpan tersebut ada perbedaan indikator penilaian.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada saat penetapan kinerja jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp. 63.785.058.000,- sedangkan pada akhir pelaksanaan kegiatan menjadi Rp 65.650.845.000,- naik sebesar Rp.1.865.787.000,-. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya sejumlah program yang membutuhkan anggaran tambahan dan adanya program baru baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Program dan kegiatan yang mengalami penambahan anggaran antara lain :

1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi,SDA dan listrik Rp 5.667.000,-
2. Kegiatan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas Rp 5.094.000,-
3. Kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja Rp 15.280.000,-
4. Kegiatan Administrasi Perkantoran Rp 50.955.000,-
5. Kegiatan peralatan gedung kantor Rp 32.000.000,-
6. Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Rp 62.604.000,-
7. Kegiatan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rp 258.149.000,-
8. Kegiatan Revitalisasi Posyandu Rp 62.812.000,-
9. Kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Rp 15.000.000,-
10. Kegiatan Penyehatan lingkungan Rp 117.685.000,-
11. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Rp 1.627.555.000,-
12. Kegiatan Peningkatan Pusk menjadi Puskesmas Rawat Inap Rp 453.575.000,-

Secara umum evaluasi untuk kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen terkait dengan tingkat penyerapan anggaran yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja keuangan untuk kegiatan yang mencapai 90%-100%

Dari 14 program dengan 47 kegiatan yang ada, sebanyak 37 kegiatan memiliki kinerja keuangan pada kisaran **90%-100%**. Hal ini menunjukkan 78,72 % dari kegiatan yang ada sudah berhasil dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.

2. Tingkat Kinerja keuangan untuk kegiatan yang < 90%

Dari 47 kegiatan yang ada, ada beberapa kegiatan yang kinerja keuangannya belum mencapai target rata-rata. Kegiatan tersebut adalah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 76,46 %, jasa administrasi keuangan 80,5 %, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 81,99 %, Pengadaan mebeler 85,75 %, Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi

Mikro Lainnya 89,61 %, Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 80,19 %, (6 kegiatan tersebut karena adanya efisiensi anggaran), untuk kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin 88,91 % dan peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap 78,45 % (2 kegiatan tersebut karena nilai pagu penawaran kontrak jauh di bawah pagu yang ditetapkan), pada kegiatan Penyusunan standar pelayanan kesehatan 61,29 % (hal ini dikarenakan ada kegiatan survay pasca akreditasi dengan narasumber pusat tidak bisa terlaksana karena padatnya jadwal ditingkat Nasional, Kegiatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 65,54 % hal ini karena adanya Program Baru Pelayanan Kesehatan Non JKN KIS, yang ditetapkan setelah anggaran perubahan.

Tabel 3.5

Capaian Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung Tahun 2017

KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
Belanja Tidak Langsung	76.477.554.000,-	75.130.005.182,-	98,2

Dari anggaran Rp 76.477.554.000,- terserap Rp 75.130.005.182,-(98,2%) hal ini dikarenakan karena adanya mutasi pegawai, pensiun dan meninggal dunia.

Tabel 3.6

Capaian Realisasi Keuangan Belanja Langsung Tahun 2017

PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 3.980.000,00	Rp 3.977.910,00	99,94
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 318.683.000,00	Rp 243.681.128,00	76,46
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 174.094.000,00	Rp 168.488.619,00	94,48
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 85.864.000,00	Rp 69.132.000,00	80,5
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 104.565.000,00	Rp 104.565.000,00	100
	Penyediaan jasa	Rp 170.280.000,00	Rp 170.029.928,00	99,85

PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET	REALISASI	%
	perbaikan peralatan kerja			
	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 48.515.000,00	Rp 48.506.000,00	99,98
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 25.508.000,00	Rp 25.507.500,00	99,99
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 3.743.000,00	Rp 3.069.000,00	81,99
	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 40.481.000,00	Rp 39.651.000,00	97,94
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 54.816.000,00	Rp 54.545.070,00	99,50
	Penunjang Administrasi Perkantoran	Rp 375.807.000,00	Rp 375.807.000,00	100
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Rp 30.685.000,00	Rp 30.655.000,00	99,90
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan peralatan kantor	Rp 132.000.000,00	Rp 131.400.000,00	99,54
	Pengadaan mebel	Rp 83.781.000,00	Rp 71.850.000,00	85,75
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 125.678.000,00	Rp 124.691.200,00	99,21
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Rp 19.655.000,00	Rp 19.655.000,00	100
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rp 130.000.000,00	Rp 119.874.000,00	92,21
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 6.514.467.000,00	Rp 6.510.423.315,00	99,93
	Peningkatan mutu penggunaan obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 5.370.188.000,00	Rp 4.896.527.946,00	91,17
Program Upaya Kesehatan	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan	Rp 208.253.000,00	Rp 199.891.175,00	95,98

PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET	REALISASI	%
Masyarakat	masalah kesehatan			
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Rp 1.307.485.000,00	Rp 1.189.593.140,00	90,98
	Revitalisasi Posyandu	Rp 347.812.000,00	Rp 347.265.500,00	99,84
	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Rp 224.488.000,00	Rp 215.630.733,00	96,05
	Fasilitasi pengelolaan penyelenggaraan BLUD	Rp 249.000.000,00	Rp 229.703.375,00	92,25
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Rp 60,000,000.00	Rp 59.739.081,00	99,56
	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	Rp 409.485.000.00	Rp 409.266.325,00	99,94
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Rp 154.060.000.00	Rp 145.442.000,00	94,40
	Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dalam rangka Kebumen Sehat(Desa Siaga)	Rp 170.754.000.00	Rp 163.084.500,00	95,50
	Pemetaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kabupaten Kebumen	Rp 156.000.000.00	Rp 148.209.500,00	95,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Rp 1.536.370.000,00	Rp 1.366.099.240,00	88,91
	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Rp 156.940.000.00	Rp 140.639.385,00	89,61
	Peningkatan	Rp 21,650,000.00	Rp 20.650.000,00	95,38

PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET	REALISASI	%
	Upaya Perbaikan Gizi di Institusi(UPGI)			
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pelayanan Penyehatan Lingkungan	Rp 1.774.858.000,00	Rp 1.735.875.940,00	97,80
	Survailans Kualitas Air	Rp 45.840,000.00	Rp 44.419.750,00	96,90
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Rp 275.499.000,00	Rp 218.957.497,00	93,16
	Peningkatan imunisasi	Rp 123.288.000.00	Rp 123.014.800,00	99,77
	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Rp 103.941.000,00	Rp 102.107.850,00	98,23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Rp 3.766.857.000,00	Rp 2.309.011.717,00	61,29
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Rp 68.605.000.00	Rp 55.017.737,00	80,19
	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Rp 120.487.000.00	Rp 110.651.575,00	91,83
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan	Rp 7.827.555.000,00	Rp 7.122.526.480,00	90,94
	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Rp 16.962.643.000,00	Rp 13.307.576.350,00	78,45
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Rp 15.179.065.000,00	Rp 10.555.601.166,00	69,54
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Rp 434.510.000,00	Rp 394.648.247,00	90,82

PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET	REALISASI	%
Program pengembangan data/informasi	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Rp 122.610.000,00	Rp 113.963.042,00	92,94
Jumlah Alokasi Belanja Langsung		Rp 65.650.845.000,00	Rp 54.070.622.721,00	82,36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data anggaran Dinas Kesehatan terjadi perubahan besarnya anggaran pada saat ditetapkannya penetapan kinerja dengan pada saat pelaksanaan kegiatan, hal ini terjadi karena adanya perubahan kebijakan umum dan anggaran pemerintah kabupaten. Perubahan itu merupakan dinamika yang memang harus terjadi mengingat perkembangan dilapangan yang tentunya ada asumsi yang berubah pada saat penetapan anggaran.

Dari hasil analisa data pada bab III, secara keseluruhan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pencapaian kinerja program kesehatan secara umum sudah berhasil dan mencapai target, tetapi ada indikator utama sebagaimana tertuang dalam Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sedangkan untuk Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) sudah mencapai target.
2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan :
 - a. 12 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah memenuhi target mencerminkan keberhasilan Dinas Kesehatan kabupaten kebumen dalam melaksanakan tugas sesuai target yang telah ditetapkan.
 - b. 6 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum berhasil memenuhi target, menjadi koreksi bagi Dinas Kesehatan atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan segera dilakukan pembenahan.
3. Evaluasi Kinerja Keuangan :

Anggaran APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2016 sebesar Rp 152.461.377.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp **135.255.466.406,00** atau 88,71 % dengan perincian ;

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Langsung | : Rp 70.470.252.000,- |
| Realisasi | : Rp 62.778.466.874,- |
| b. Belanja Tidak langsung | : Rp 73.991.125.000,- |
| Realisasi | : Rp 72.476.999.532,- |

B. Saran

Dengan melihat kinerja Dinas Kesehatan khususnya yang terkait dengan hambatan-hambatan yang ditemui serta agar lebih meningkat kinerjanya tahun yang akan datang perlu ditempuh beberapa hal berikut ini :

1. Optimalisasi pelaksanaan program kesehatan dalam rangka percepatan pencapaian SPM bidang Kesehatan dan tujuan MDGs
2. Mengembangkan dan peningkatan kerjasama lintas sektor dan swasta terutama dalam hal kemitraan guna mendorong pembangunan yang berwawasan kesehatan yang sinergis.
3. Keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan dampak terhadap kesehatan.
4. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Kesehatan melalui peningkatan akses dan jangkauan pelayanan kesehatan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dengan pemenuhan peningkatan SDM yang profesional melalui pelatihan teknis dan pemenuhan sarana prasarana kesehatan
6. Pemantapan kapasitas dan mutu pelayanan kesehatan melalui pendayagunaan potensi seluruh sumberdaya yang ada dengan pendekatan Paradigma sehat.
7. Memantapkan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan di Kabupaten dan Puskesmas, sehingga setiap pengambilan keputusan selalu berdasarkan fakta.

Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2016
(Berdasarkan Perbup Kebumen No.54 Tahun 2013)

No	Indikator SPM	Target 2016	Pencapaian Tahun 2016		
			Target Sasaran	Realisasi	Cakupan (%)
1.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95 %	21.749	20.485	94,19 %
2.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	80 %	4.350	4.350	100 %
3.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95 %	20.020	19.325	96,53 %
4.	Cakupan pelayanan nifas	90 %	20.020	19.656	98,18 %
5.	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80 %	3.000	3.000	100 %
6.	Cakupan Kunjungan Bayi	92 %	19.997	19.997	100 %
7.	Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	460	460	100 %
8.	Cakupan pelayanan anak balita	87 %	81.936	79.083	96,52 %
9.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%	11.516	9.838	85,43 %
10.	Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	8	8	100%
11.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD & setingkat	100%	22.082	22.082	100 %
12.	Cakupan peserta KB Aktif	70%	208.402	154.072	73,93 %
13.	Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita Penyakit :				
	A. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	≥ 2/100 ribu	9 kss	9 kss	2,57 / 100 ribu
	B. Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100%	4.263	4.263	100 %
	c. Penemuan Pasien Baru TB BTA (+)	70%	1.268	604	48 %
	d. Penderita DBD yang ditangani	100%	482	482	100%
	E. Penemuan Penderita Diare	100%	25.358	25.358	100%
14.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	100%	649.291	619.668	95,4 %

No	Indikator SPM	Target 2016	Pencapaian Tahun 2016		
			Target Sasaran	Realisasi	Cakupan (%)
15.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100%	61.967	24.289	39,20 %
16.	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Kota	100%	12	12	100 %
17.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	4	4	100 %
18.	Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	40 %	460	64	13,9 %